

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI PASCA
DIGULINGKANNYA REZIM MORSI (TH.2013)**

Yunita Dwi Cintya S

Jurusan Hubungan Internasional

Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

yunita.dwi.2012@fisipol.umy.ac.id.

Abstract

This article tries to explain about Turkey's foreign policy, especially changes in Turkey foreign policy towards Egypt after overthrow Morsi in 2013. Turkey as an influential country in the Middle East that have a close relations with Egypt, especially after Recep Tayyip Erdogan being a turkey's prime minister in 2003. Turkey began a confrontative foreign policy to Egypt after Egypt's conflict in 2013. Turkey saw the overthrow of Morsi as a military coup that has violated human rights. To explain the factors why the Turkish changed its policy, the author uses the theory of Foreign Decision. Foreign policy of a country is influenced by three things such as, domestic politic, economy and military capabilities and international context.

Keywords : Confrontative Foreign policy , Overthrow Morsi, Domestic politic, Economy and Military Capabilities and International Context.

Abstrak

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Turki, terutama perubahan dalam kebijakan luar negeri Turki terhadap Mesir pasca penggulingan Morsi pada tahun 2013. Turki sebagai negara berpengaruh di Timur Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan Mesir, terutama setelah Erdogan menjadi perdana menteri Turki pada tahun 2003. Kebijakan luar negeri Erdogan yang mengarah ke Timur Tengah memberikan peningkatan hubungan kerjasama antara

Turki - Mesir. Namun, Turki mulai memberikan kebijakan luar negeri yang konfrontatif terhadap Mesir setelah konflik Mesir pada tahun 2013. Turki melihat penggulingan Morsi sebagai kudeta militer yang telah melanggar hak asasi manusia. Untuk menjelaskan faktor - faktor mengapa Turki merubah kebijakannya tersebut penulis menggunakan teori pembuatan keputusan luar negeri. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh 3 hal yakni, kondisi politik dalam negeri, kapabilitas ekonomi dan militer dan konteks internasional

Kata kunci : Kebijakan luar negeri yang konfrontatif, Penggulingan Morsi, Kondisi Politik dalam Negeri, Kemampuan Ekonomi dan Militer, Konteks Internasional.

Pendahuluan

Turki merupakan negara yang berpaham sekuler yang pada awalnya menjadi bagian kesultanan besar di masa Dinasti Utsmani yang kini telah menjadi Republik Turki. Sejak runtuhnya daulah Utsmaniyah, rezim republikan Kemal Pasha yang dengan sebutan Atatürk, telah meninggalkan semua warisan dari sistem pemerintahan Islam dan lebih memilih membangun bangsa Turki dengan caranya sendiri dengan versi pemerintahan ala bangsa Barat. Sejarah Turki selama 150 tahun terakhir memberikan contoh keberhasilan pertemuan peradaban Barat dan Timur.

Perubahan yang terjadi pada sistem politik-pemerintahan (dari monarki absolut ke demokrasi republik) dan ekonomi (dari tradisional ke liberal) ini, ternyata memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Turki dalam membangun hubungan dan pengaruh politik di tingkat regional (Timur Tengah) maupun di tingkat dunia (Barat). Semakin kompleksnya perubahan yang terjadi di ranah domestik Turki (ekonomi, politik, sosial dan keamanan) serta semakin dipertimbangkannya posisi Turki di kancah internasional, seolah mendorong Turki untuk melakukan upaya reorientasi paradigma atas kebijakan politik luar negerinya. Turki menjadi lebih moderat dan akomodatif terhadap kepentingan semua pihak (Barat maupun Timur Tengah).

Berbeda dengan pendahulunya, Turki pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi / Justice and Development Party/* Partai Keadilan dan Pembangunan) telah membawa perubahan luar biasa pada Turki. Kebijakan yang diterapkan dari tahun 2002 hingga tahun 2010 berhasil memberi dampak positif yang sangat signifikan untuk pertumbuhan kualitas ekonomi dan politik di Turki. Kebijakan bertetangga Turki dengan doktrin baru yang dibawa oleh pemerintahan Recep Tayyip Erdogan dengan partai AKP nya membuat hubungan Turki semakin erat dengan beberapa negara tetangga termasuk beberapa negara tetangga yang dianggap sebagai "saingan"dari Eropa seperti Rusia, dan beberapa negara di Timur Tengah seperti Iran dan Suriah, bahkan mulai juga melakukan hubungan yang baik dengan wilayah otonomi Kurdi di Irak utara yang dalam beberapa dekade sempat memiliki hubungan yang buruk.

Di dalam negeri sendiri, Erdogan memang dianggap mampu membuat Turki sebagai kekuatan ekonomi-politik di Timur Tengah dan Eropa, di saat negara-negara Eropa tertimpa krisis dan defisit pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009. GDP (*gross domestic product*). Turki mengalami peningkatan yang pesat dan pendapatan turki telah menempati urutan ke 16 terbesar di dunia serta masuk ke dalam negara G-20. Selain itu pertumbuhan ekonomi Turki pasca krisis ekonomi 2008-2009 juga tercatat sebagai Negara yang tercepat pulihnya dengan pertumbuhan sebanyak 5%.

Sejalan dengan Kebijakan politik luar negeri Turki guna menancapkan pengaruhnya ke Negara-negara Timur Tengah, Turki pun mulai menjalin hubungan dengan Negara Mesir. Seperti yang diketahui bahwa Mesir merupakan Negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia Arab setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Aljazair. Mesir mempertahankan tingkat 7% pertumbuhan pertahun pada periode 2005-2008 sebagai akibat dari proses liberalisasi, tetapi kemudian menurun menjadi sekitar 4% pertumbuhan pada tahun 2009 akibat krisis ekonomi global.Total ekspor Mesir pada tahun 2009 adalah 23, 9 miliar dolar, sementara impor adalah 46, 6 miliar dolar. Kerjasama ekonomi masih merupakan kekuatan pendorong dalam

pengembangan hubungan Turki-Mesir (Yazdır, 2011).

Keharmonisan hubungan Turki dan Mesir makin terlihat setelah ditandatanganinya Free Trade Agreement pada tahun 2005 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2007. Perdagangan Turki dengan Mesir meningkat dua setengah kali dalam tiga tahun sebagai akibat dari Perjanjian Perdagangan Bebas tersebut. FDI Turki di Mesir juga meningkat dari sekitar \$ 60 juta pada tahun 2005 menjadi \$1,5 miliar pada 2010. Ekspor Mesir ke Turki pun terus meningkat dan mencapai \$1,6 miliar pada tahun 2012. Sedangkan Ekspor Turki ke Mesir meningkat hingga \$3,2 miliar pada tahun 2012. Erdogan juga telah meningkatkan perdagangan antara kedua negara menjadi US \$ 10 miliar. Investasi Turki di Mesir yang tadinya hanya \$ 1,5 miliar kemudian meningkat menjadi \$ 5 miliar (Champion, 2011).

Dari segi politik, Turki makin memperlihatkan pengaruhnya di Mesir ketika terjadi Arab Spring pada tahun 2011 yakni pada saat penggulingan rezim Hosni Mubarak. Turki tampil sebagai Negara pendukung demokrasi di Negara tersebut hingga menjalin hubungan baik dengan Presiden Mesir terpilih selanjutnya yakni Mohammad Morsi.

Baik secara politik dan ekonomi, Mesir dan Turki mengembangkan hubungan yang lebih kuat di bawah pimpinan Mohammad Morsi. Kunjungan resmi ke Ankara oleh Morsi pada 30 September 2012 dilakukan guna Turki memberikan pinjaman langsung dan dana investasi terhadap Mesir. Pada saat itu Turki telah sepakat untuk memberi bantuan sebesar dua miliar dolar AS guna memperkuat ekonomi Mesir pasca revolusi. Selain itu pada 17 November 2012, Perdana Menteri Erdogan melakukan perjalanan ke Kairo untuk bergabung dengan Perdana Menteri Mesir, Hisham Qandil, di Mesir-Turki Ekonomi Forum, di mana kepala Dewan Bisnis Mesir-Turki menerangkan mengenai upaya Morsi untuk membuka jalan lebih lanjut bagi Turki untuk menanamkan investasi di dalam negeri Mesir. Turki pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi* /

Justice and Development Party/ Partai Keadilan dan Pembangunan) yang dipimpinya telah membawa perubahan luar biasa pada Turki, terutama sekali dalam percaturan hubungan internasional Turki mampu merumuskan sebuah kebijakan luar negeri yang komprehensif, tidak terdiktomi dalam polar kekuatan dunia dan menekankan pada aspek *soft power* (kekuatan ekonomi-politik dan kebudayaan/pengetahuan).

Turki menanamkan visi neo-Ottoman dalam kebijakan luar negerinya. Neo-Ottomanism, memberikan tempat yang menonjol untuk nilai- nilai Islam dan sejarah imperialism Turki sebagai alat *soft power* dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, yakni mulai mengikis Negara sekuler warisan Kemalis. *Blue print* dari kebijakan ini dituangkan dalam *Depth Strategis* yakni doktrin yang dikemukakan oleh Ahmet Davutoglu. Di dalam *Depth Strategic* ini menjelaskan tentang keterlibatan Turki dalam kerjasama dengan Negara-negara tetangga seperti Balkan, Kaukasus, dan Timur Tengah. Davutoglu mendorong agar Turki kembali aktif menjalin hubungan dengan Negara- Negara Timur Tengah, secara khusus dengan Iran, Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir, dan Negara-negara Teluk.

Pemikiran Ahmet Davotoglu yang merupakan penasehat PM Erdogan dan juga menteri luar negeri, dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul “*Strategic Depth*”. Karya Ahmet Davotoglu sangat mempengaruhi adanya pergeseran identitas (Al-Monitor, 2014). Davotoglu berpandangan bahwa Turki dapat menjadi *center*, tidak hanya menjadi jembatan bagi Dunia Barat. Ada empat hal yang menjadi pilar utama dalam *Strategic Depth* Ahmet Davotoglu yang sangat mempengaruhi politik luar negeri Turki terhadap hubungannya dengan negara-negara di dunia salah satunya adalah Mesir.

Pembahasan

Politik luar negeri konfrontatif Turki terhadap Mesir

Hubungan harmonis yang tercipta Antara Turki dan Mesir ini tidak bertahan lama setelah pemerintah transisi yakni Muhammad Morsi digulingkan oleh Presiden baru Mesir yakni Abdel Fattah el-Sisi 2013 lalu. Turki tidak dapat menerima keadaan tersebut dan menyatakan hal itu merupakan suatu kudeta militer. Penurunan Morsi dari tampuk kekuasaannya memiliki dampak yang luar biasa pada hubungan antara Ankara dan Kairo

Hubungan Turki-Mesir kian memburuk terutama pasca diusirnya Duta Besar Turki untuk Mesir, Avni Botsali. Mesir dan Turki menurunkan taraf hubungan diplomatik pada November 2013 lalu dengan aksi saling usir duta besar dengan label “*persona non-grata*”. Politik Luar Negeri Turki di bawah Erdogan pun mulai menjadi lebih konfrontatif terhadap Mesir pasca digulingkannya rezim Morsi ini..

Dengan hubungan yang kian memanas antar kedua Negara ini, Mesir mulai mengubah kebijakannya dalam menjalin hubungan perdagangan dengan Turki yakni dengan menghapus kesepakatan dagang dengan pemerintah Turki, dan tidak melakukan perpanjangan kerjasama setelah MOU berakhir pada akhir bulan Maret 2015 lalu. Tidak hanya berdampak pada pemutusan kerjasama perdagangan antar kedua Negara, politik Turki – Mesir yang kian memburuk ini menyebabkan penanaman investasi Turki di Mesir juga cenderung menurun. Hal ini dikarenakan semakin dipersulitnya penanaman investasi (*Foreign Direct Investment*) Turki oleh pihak Mesir. Para pengusaha yang sebelumnya dengan sangat yakin untuk melebarkan ekspansinya ke Negeri Mesir ini harus sedikit bersabar hingga hubungan Turki – Mesir mulai dinormalisasi agar hubungan kerjasama dalam bidang investasi ini juga dapat berjalan seperti sedia kala.

Selain itu, dalam bidang pariwisata telah dilakukan pembatasan visa bagi

warga negara Mesir yang ingin mengunjungi Negara Turki. Turki yang sebelumnya telah dijadikan Mesir sebagai salah satu destinasi favorit bagi wisatawan asal Mesir ini mengakibatkan kerugian bagi pihak Turki. Hal ini telah berdampak pada menurunnya penghasilan baik bagi pihak maskapai penerbangan yang melayani jalur lintas Turki – Mesir maupun bagi agen-agen wisata yang biasanya melayani para wisatawan Mesir yang berkunjung ke Turki.

Tidak hanya Mesir yang bersifat konfrontatif terhadap Turki namun Turki pun juga mengambil langkah yang sama ketika Mesir melakukan pengusiran Duta Besar Turki di Mesir maupun akibat dari pemutusan dalam kerjasama perdagangan maupun pariwisata antar kedua Negara tersebut. Menanggapi pemutusan kerjasama dalam bidang perdagangan, pihak Turki tidak tinggal diam dan segera mencari cara untuk menangani hal tersebut. Pada 22 April 2015 lalu, para eksportir Turki dengan cepat mengubah rute perdagangan. Para eksportir Turki tidak ingin hanya terus berdiam diri melihat semakin menurunnya kerjasama perdagangan dengan Mesir tersebut dan terus membiarkan kerugian yang menumpuk akibat dilarangnya Turki untuk melewati Negara Mesir sebelum memasuki pasar di Negara-negara Teluk. Maka oleh karena itu, mereka mengubah titik transit dari Mesir ke Iran untuk memasuki pasar di negara-negara teluk (Riyanto, 2015).

Dalam bidang pertahanan, Turki telah membatalkan dua jadwal latihan Angkatan Laut dengan Mesir. Keputusan ini diambil setelah perlakuan keras aparat keamanan Mesir pada pendukung presiden terguling Mohammad Morsi dan yang telah menyebabkan ribuan orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Levent Gumrukcu, mengaku telah menyampaikan keputusan ini kepada pihak Mesir. “Telah disampaikan ke Mesir tentang keputusan untuk membatalkan undangan bagi Mesir untuk berpartisipasi dalam dua latihan perang Angkatan Laut. Satu latihan bersifat bilateral dan yang lainnya latihan dalam agenda NATO,” jelas Gumrukcu. Keputusan ini diambil Pemerintah Turki satu hari setelah mereka memanggil Duta

Besar Turki untuk Mesir. Pemerintahan Islam yang mengakar di Turki sangat mengutuk "agresi" oleh pasukan keamanan Mesir terhadap para pendukung Morsi.

Recep Tayyip Erdogan yang kini telah menjadi Presiden Turki juga telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang guna membahas situasi di Mesir. Selama ini, Turki adalah salah satu negara yang bersikap paling keras dengan kondisi di Mesir. Turki juga mengecam Amerika Serikat yang tidak menyatakan penggulingan Morsi oleh militer sebagai tindakan kudeta. Ketegangan yang tidak kunjung usai ini juga telah menyebabkan Turki memutuskan untuk membekukan sejumlah perjanjian dengan Mesir. Perjanjian bilateral yang terjadi antara kedua Negara dalam bidang perawatan transportasi, pendidikan dan kesehatan telah dibekukan. Selain itu, Turki juga telah menghentikan pengiriman kendaraan udara tanpa awak buatan Turki ke Mesir (Islampos, 2013).

Kondisi Dalam Negeri

Kudeta militer di Mesir mengkhawatirkan banyak pihak. Turki yang goyah akibat diguncang demo besar-besaran oleh kelompok sekuler, meradang dengan kudeta Mesir. Kudeta militer di Mesir dan tergulingnya Muhammad Mursi oleh militer rupanya menjadi pelajaran bagi sejumlah negara kawasan. Turki adalah salah satu negara kawasan yang memiliki kekhawatiran kondisi di Mesir dapat terulang di Ankara. Apalagi kondisi negara ini dalam beberapa pekan terakhir mulai dipicu sejumlah kerusuhan.

Skandal target suap yang dituduhkan kepada Perdana Menteri Turki sekaligus pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) ini telah mempengaruhi masa depan politik Turki. Erdogan menuduh pemerintah asing yang menjadi salah satu pihak yang memprovokasi adanya demonstrasi melawan Pemerintahannya. Demonstrasi besar-besaran anti-pemerintah pada juni 2013 lalu yang bertempat di Taman Gezi memberi pukulan telak terhadap Erdogan. Skandal korupsi menjadi satu alasan penting masyarakat untuk berunjuk rasa menentang pemerintah. Eskalasi krisis

politik dalam negeri bisa memprovokasi ketidakstabilan di Turki dan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki untuk memainkan peran pentingnya di Timur Tengah (Protopapas, 2014).

Untuk mengatasi hal tersebut, parlemen Turki dengan cepat menyepakati amandemen undang-undang angkatan bersenjata demi mencegah kudeta militer di negara ini. Parlemen merevisi pasal 35, yang membatasi tentara hanya untuk “membela bangsa melawan ancaman eksternal dan bahaya,” demikian dilaporkan Anatolia News Agency. Perubahan butir 35 undang-undang angkatan bersenjata Turki yang memungkinkan militer untuk campur tangan di urusan politik, diratifikasi dengan suara mayoritas anggota parlemen. Butir 35 ditambahkan ke undang-undang angkatan bersenjata Turki pasca kudeta 27 Mei 1960. Undang-undang ini juga dimanfaatkan sebagai dalih kudeta militer pada 12 Maret 1971 dan 12 September 1980.

Berdasarkan butir ini, militer bertanggung jawab menjaga dan melindungi pemerintahan Republik di Turki. Namun kini butir 35 undang-undang tersebut diubah dan kini militer bertanggung jawab mempertahankan wilayah Turki dari ancaman asing dan memperkuat kemampuan mereka serta meningkatkan kemampuan pertahanan yang dimilikinya (Suara Islam Corporation, 2013). Dalam butir ini disebutkan pula bahwa misi luar negeri militer untuk membantu perdamaian dunia harus mendapat persetujuan parlemen. Petinggi Turki meratifikasi butir undang-undang militer di parlemen dengan tujuan mencegah terjadinya kudeta militer yang terus menerus ingin menumbangkan pemerintahan Recep Tayyip Erdogan dengan berbagai isu panas di dalam negeri Turki.

Kekhawatiran menurunnya stabilitas ekonomi Turki dan FDI Turki di Mesir akibat adanya pemutusan kerjasama perdagangan oleh Mesir

Kudeta militer yang terjadi di Mesir telah memperburuk hubungan Turki – Mesir dalam bidang perdagangan. Turki yang terus mengecam kudeta militer yang terjadi di Mesir dinilai El Sisi terlalu mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Saling usir duta besar telah cukup memperkeruh hubungan kedua Negara ini. El Sisi juga bertindak semakin jauh dengan mengakhiri perjanjian kerjasama perdagangan Negara Turki.. Otoritas Mesir melarang truk tronton dan kapal Turki untuk melintas di wilayah Mesir dalam perjalanan menuju negara-negara Teluk. Ahmad Amin, penasehat Menteri Transportasi Mesir untuk Urusan Transportasi Laut mengatakan, bahwa kebijakan ini diambil oleh kementeriannya setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan beberapa pihak terkait lainnya. Mereka semua sepakat untuk menghapus kesepakatan dagang dengan pemerintah Turki, dan tidak melakukan perpanjangan kerjasama setelah MOU berakhir pada akhir bulan Maret 2015 lalu. Ia mengatakan bahwa keputusan ini akan dijalankan pada awal April tahun depan (Syarief, 2014).

Neraca perdagangan antara Turki dan Mesir telah mencapai sebesar 4,2 miliar dolar AS pada 2013, dengan ekspor Turki ke Mesir senilai 3,9 miliar dolar AS sedang ekspor Mesir ke Turki mencapai 1,7 miliar dolar AS. Namun pada tahun 2014 setelah naiknya rezim El Sisi, nilai ekspor Turki ke Mesir maupun ekspor Mesir ke Turki mengalami penurunan akibat adanya pemutusan kerjasama dalam bidang perdagangan. Mesir menjadi Negara tujuan ekspor nomor 7 terbesar di Dunia dan nomor 4 terbesar di kawasan Timur Tengah bagi Turki (Trade, European Union, Trade in goods with Turkey, 2015). Sedangkan Turki menjadi Negara tujuan ekspor nomor 4 terbesar di Dunia dan nomor 2 terbesar di kawasan Timur Tengah bagi Mesir. Selain itu, Turki menjadi Negara asal impor nomor 7 terbesar di Dunia dan nomor 2 terbesar di kawasan Timur Tengah bagi Mesir (Trade, European Union, Trade in goods with Egypt, 2015).

Sengketa politik saat ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan hubungan ekonomi antara kedua negara. Saat ini terdapat 280 perusahaan Turki yang beroperasi di pasar Mesir, dengan jumlah investasi sebesar \$ 1,5 miliar dan mempekerjakan beberapa 52.000 orang Mesir. Perdagangan antara Mesir dan Turki mencapai \$ 5,2 miliar pada akhir 2012. Karena angka-angka ini, pengusaha dari kedua Negara berusaha mencari jalan terbaik untuk menjaga hubungan ekonomi yang baik. Adel Al-Lamei, kepala Dewan Bisnis Mesir-Turki, mengatakan bahwa pengusaha Mesir dan Turki telah bertemu di Kairo untuk mencari cara memisahkan perbedaan pendapat politik dari kerjasama ekonomi. Pengusaha harus menghindari perbedaan pendapat politik. Ia juga menunjukkan bahwa situasi saat ini bisa memiliki efek negatif pada hubungan ekonomi, meskipun ia berharap bahwa ketegangan tersebut akan segera berakhir. Hubungan antara negara-negara biasanya memiliki pasang surut, dan situasi saat ini adalah periode yang diyakini pada akhirnya dapat dilalui oleh kedua Negara.

Meskipun situasi politik belum begitu jauh terkena dampak negatif bisnis Turki yang ada di Mesir bisa mempengaruhi rencana ekspansi di kalangan investor Turki. Kordsa, sebuah perusahaan Turki yang telah beroperasi di Mesir selama 20 tahun, telah menempatkan rencana ekspansi senilai \$ 140.000.000 ditunda hingga keretakan politik antara Mesir dan Turki kembali normal. Memanasnya hubungan Turki Mesir mengakibatkan peluang investasi Turki di Mesir mengalami kemandatan serta terputusnya kerjasama perdagangan telah mengakibatkan menurunnya nilai ekspor impor kedua Negara.

Ideologi El Sisi

Perubahan kebijakan Turki yang lebih konfrontatif terhadap Mesir disebabkan oleh adanya perubahan rezim yang terjadi yakni yang pada mulanya Mesir dipimpin oleh Mohammad Mursi menjadi dipimpin oleh Abdel Fattah El Sisi. Cara El Sisi

untuk menaiki tampuk kekuasaan di Mesir pada 2013 lalu yakni dengan melakukan kudeta militer yang telah menewaskan 3000 korban dan mendakwakan hukuman mati terhadap pemimpin Mesir sebelumnya yakni Morsi dan pendukungnya Ikhwanul Muslimin. Turki melihat hal tersebut sebagai suatu pelanggaran HAM dan tidak dapat menerima hal tersebut. Turki yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan dengan keras bersuara bahwa tidak akan mengakui pemerintahan El Sisi ini dan ia menginginkan agar Morsi dan pendukungnya segera dibebaskan.

Drama politik di Mesir berjalan begitu cepat. Pada 30 Juni, oposisi mendemo Presiden Mursi. Tiga hari kemudian (3 Juli), militer dikomandani Jenderal Abdul Fattah Sisi membelot ke oposisi dengan mengudeta sang presiden yang terpilih secara demokratis, membekukan Konstitusi Negara, dan membubarkan Majelis Syuro. Selanjutnya, militer menunjuk presiden boneka dan mengajukan peta jalan (*khiritoh at toriq*) yang harus ditempuh para politisi. Kemudian pada 22 Agustus, mantan penguasa diktator otoriter Husni Mubarak dibebaskan dari penjara. Mubarak adalah jenderal (purn) angkatan udara yang telah berkuasa lebih 30 tahun.

Antara kudeta militer hingga pembebasan Mubarak selama kurang dari dua bulan telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. 3.000 orang menjadi syahid dibantai militer, ribuan lain luka berat dan ringan, ribuan lagi hilang dan ditahan. Perseteruan antara militer dan gerakan Islam politik yang diwakili oleh Ikhwanul Muslimin boleh dikata sudah berjalan puluhan tahun lalu yaitu ketika pada 1952 militer Mesir yang dikomandani Jamal Abdul Nasir mengudeta kekuasaan Raja Faruk. Sejak itu, hingga pada masa Anwar Sadat dan kemudian Husni Mubarak, militer berkuasa penuh atas bangsa Mesir.

Perseteruan itu berpangkal pada perbedaan ideologi antara militer dan Ikhwanul Muslimin (Mashuri, 2013). Militer berideologi sekuler, sedangkan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan Islam politik ingin menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1960-an, Nasir menerapkan

ideologi sosialis-komunis yang tidak hanya memisahkan agama dari negara, tapi juga mengabaikan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam militer. Kemudian, ketika Anwar Sadat menggantikan Abdul Nasir sebagai presiden, Sadat mengubah kiblat militer Mesir dari Uni Soviet ke Amerika Serikat, terutama setelah Perjanjian Camp David pada 1978, yaitu perjanjian damai Mesir dengan Israel yang difasilitasi oleh Amerika. Dalam perjanjian itu tercantum, AS menjamin berbagai bantuan kepada Mesir yang meliputi persenjataan, dana, latihan perang, tukar-menukar informasi, konsultasi, pendidikan perwira militer, dan lainnya.

Perjanjian Camp David yang telah mengucilkan Mesir dari dunia Arab, juga sekaligus telah mendekatkan militer Mesir dengan militer Amerika. Hubungan yang kemudian semakin memperkuat ideologi sekuler di kalangan militer Mesir. Kebijakan yang sama kemudian juga diterapkan pada zaman Presiden Husni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun lebih. Dengan ideologi sekuler seperti itu, tidak aneh bila gerakan politik yang diwakili Ikhwanul Muslimin terus-menerus menjadi musuh bebuyutan rezim militer Abdul Nasir, Anwar Sadat, dan Husni Mubarak. Tokoh-tokohnya juga telah banyak yang dibunuh atau dipenjarakan. Dan yang lainnya juga melarikan diri ke luar negeri.

Revolusi rakyat besar-besaran yang kemudian menggulingkan rezim Husni Mubarak tampaknya telah membuat militer Mesir terkejut dan sekaligus berang. Apalagi, yang muncul sebagai pemenang dalam pemilu yang demokratis adalah Muhammad Mursi, presiden yang dicalonkan oleh Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin. Lebih menyakitkan lagi ketika Presiden Mursi kemudian mengembalikan tugas-tugas militer, sebagai konsekuensi dari negara demokratis, hanya sebatas pertahanan negara alias kembali ke barak. Militer tidak boleh terlibat dalam urusan politik. Karena itu, rentetan peristiwa dari kudeta militer (penggulingan Mursi), pembubaran Majelis Syuro, pembekuan konstitusi, penunjukan presiden sementara (boneka), hingga pembebasan Husni Mubarak harus dibaca sebagai "hal yang direncanakan", bukan peristiwa yang tiba-tiba. Untuk tujuan

itu, mereka pun berkonspirasi dengan kelompok-kelompok liberal, sekuler, nasionalis, dan fulul (orang-orang dari rezim Mubarak). Mereka kemudian membentuk oposisi kuat terhadap Mursi dan menuduh sang presiden ingin menjadikan Mesir sebagai negara Ikhwanul Muslimin (*akhunatu Misro*) hingga dapat menjatuhkan bahkan menghukum mati Presiden Mesir yang hanya berkuasa selama 2 tahun ini.

Memanasnya hubungan Antara Turki – Mesir tidak hanya dikarenakan pelanggaran HAM yang telah dilakukan El Sisi pada saat kudeta militer tersebut, namun dikarenakan perbedaan ideologi yang dimiliki Erdogan dan El Sisi. Erdogan yang berpaham islam moderat serta menginginkan terciptanya Negara Islam yang demokratis sedangkan di lain pihak Abdel Fattah El Sisi yang merupakan mantan Panglima Militer Mesir ini menginginkan Negara Mesir kembali seperti layaknya pada era Hosni Mubarak yakni dipimpin oleh militer dan bukannya dikendalikan oleh basis islam seperti yang dilakukan pada era Morsi. El Sisi menganggap Turki terlalu ikut campur dalam politik dalam negeri Mesir sedangkan Turki sendiri menganggap Mesirlah pemerintahan tirani yang dengan segala upaya ingin menduduki tampuk kekuasaan di Mesir meskipun dengan menghilangkan nyawa ribuan orang. Ketidaktepahaman dalam ideologi kedua pemimpin ini menyebabkan perbedaan pola pikir dalam pengambilan keputusan luar negeri kedua Negara.

Selain hubungan personal, partai AKP Erdogan juga memiliki kedekatan ideologis dengan gerakan Ikhwanul Muslimin (Republika, 2015). Erdogan yang telah berhasil mengurangi sekulerisme, meningkatkan demokrasi serta mengurangi pengaruh militer di dalam negeri Turki juga menginginkan Mesir melakukan hal yang sama yakni menjadi Negara yang tidak dikendalikan oleh kekuatan militer serta meningkatkan demokrasi di negaranya. Selama dua tahun terakhir, Erdogan dan partainya AKP menjalin hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, terutama karena berambisi memperbesar pengaruhnya di Mesir. Hal tersebut pun disambut baik oleh

Morsi tatkala ia menjabat sebagai Presiden Mesir. Berbagai kerjasama pun terjalin baik dalam bidang perdagangan, kesehatan, pariwisata maupun pertahanan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Mesir Mohammad Mursi merupakan Pemimpin negara yang tinggal di situasi dan kondisi Negara yang berbeda. Erdogan hidup ditengah-tengah negara yang sekuler, sedangkan Mursi hidup dalam negara yang masih menjunjung nilai-nilai Agama, namun masih didominasi oleh kekuatan militer. Kedua tokoh ini memiliki tujuan, dan kerangka berpikir yang sama, hanya metode mereka lah yang berbeda. Erdogan berhasil menggunakan senjata berupa “demokrasi” , “HAM” untuk memenangkan pertarungannya melakukan islamisasi turki dan mengurangi sekulerisme di negeri tersebut hingga menyebabkan Turki sebagai representasi politik Islam paling sukses saat ini. Sedangkan di pihak lain, Morsi masih bergelut untuk membenahi perekonomian Mesir yang terpuruk akibat transisi tahun 2011, untuk mengurangi pengaruh militer didalam pemerintahan serta untuk mewujudkan paham demokrasi. Namun hal-hal tersebut belum sempat diwujudkan akibat penggulingan yang terjadi pada 2013 lalu. Dan hubungan Turki – Mesir juga kian memanas dengan adanya perbedaan ideologi antara Erdogan dan El Sisi.

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki menjadi lebih konfrontatif terhadap Mesir yakni berdasarkan kondisi dalam negeri Turki, kekhawatiran Turki akan menurunnya stabilitas ekonomi Turki sebagai akibat dari pemutusan kerjasama perdagangan oleh Mesir dan akibat adanya perubahan rezim di Mesir.

Referensi

- Al-Monitor. (2014, August 13). *Al-Monitor*. Retrieved from Al-Monitor Web Site:
<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/zaman-davutoglu-ideologue-behlul-ozkan-academic-akp-islamic.html>
- Champion, M. (2011, September 15). *The Wall Street Journal*. Retrieved from The Wall Street Journal Web Site:
<http://www.wsj.com/articles/SB10001424053111904060604576570250183363170>
- Islampos. (2013, July 31). *Islampos*. Retrieved from Islampos Web Site:
<https://www.islampos.com/pasca-penggulingan-mursi-turki-bekukan-sejumlah-perjanjian-dengan-mesir-71770/>
- Mashuri, I. K. (2013, August 26). *Republika*. Retrieved from Republika Web Site:
<http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/08/26/ms430f-mengapa-militer-mesir-berseTERU-dengan-ikhwanul-muslimin>
- Protopapas, G. (2014). *The Implications of Turkish Crisis in the Domestic and Foreign Policy*. Ljubljana: Ifimes (Interational Institutes for Middle East and Balkan Studies).
- Republika. (2015, April 11). *Republika*. Retrieved from Republika Web Site:
<http://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/15/04/11/nmn0dn-erdogan-ingin-mursi-bebas>
- Riyanto, G. D. (2015, April 11). *Varia Id*. Retrieved from Varia Id Web Site:
<http://www.varia.id/2015/04/11/turki-geser-jalur-perdagangan-dari-mesir-ke-iran/>
- Suara Islam Corporation. (2013, August 3). *Suara Islam*. Retrieved from Suara Islam Web Site: <http://www.suara-islam.com/read/index/7929/-Turki-Waspadai-Militer>
- Syarief, M. (2014, October 28). *Dakwatuna*. Retrieved from Dakwatuna Web Site:
<http://www.dakwatuna.com/2014/10/28/59029/mesir-larang-tronton-dan-kapal-turki-melintasi-wilayah-mesir/#axzz3qJKxvS9R>
- Trade, D.-G. f. (2015). *European Union, Trade in goods with Egypt*. European Union: European Commission.
- Trade, D.-G. f. (2015). *European Union, Trade in goods with Turkey*. European Union: European Commission.